

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN PROPOSISI

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini berisi uraian mengenai konsep dan teori yang relevan sebagai landasan dalam menganalisis Efektivitas Program *Area Traffic Control System* (ATCS) Pada Dinas Perhubungan Dalam Mengurangi Kemacetan di Kota Bandung (Studi Kasus Persimpangan Pasteur). Landasan teori ini diperlukan untuk memberikan arah dan batasan dalam memahami permasalahan yang diteliti.

2.1.1. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu merupakan tinjauan sistematis terhadap hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik atau permasalahan yang sedang diteliti. Kajian peneliti terdahulu dapat membantu peneliti memahami perkembangan teori dan temuan sebelumnya, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari penelitian-penelitian yang telah ada, serta merumuskan pertanyaan penelitian yang lebih tajam dan relevan dengan kebutuhan saat ini, walaupun permasalahannya tidak sama persis tetapi itu sangat membantu peneliti agar bisa menemukan sumber-sumber pemecahan masalah dalam penelitian. Kajian peneliti terdahulu yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut :

1. Peneliti Aidila Fitria (2023).

Penelitian ini pertama dilakukan oleh Aidila Fitria berjudul “Efektivitas Program *Area Traffic Control System* (ATCS) Dalam Mengurangi Kemacetan Sebagai Penerapan Smart Traffic Di Kota Bandar Lampung” bertujuan untuk menganalisis keefektifitasan Program Area Traffic Control System (ATCS),serta penghambatnya. Penelitian ini menggunakan teori Administrasi Negara sebagai landasan,serta teori efektivitas menurut (Budiani 2007),dengan indikator ketepatan sasaran program,sosialisasi program,tujuan program,pemantauan program.Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data ,wawancara,observasi, dan dokumentasi.Analisis data dilakukan melalui reduksi data,penyajian data,dan penarikan kesimpulan dengan uji keabsahan triangulasi.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas Program *Area Traffic Control System* (ATCS) di Kota Lampung belum efektif serta terdapat hambatan dalam pengoptimalan sosialisasi yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Lampung.

2. Peneliti Nurliana Kurniasih, Antik Bintari, Jajang Sutisna (2023).

Penelitian yang kedua dilakukan oleh Nurliana Kurniasih, Antik Bintari, Jajang Sutisna berjudul “Efektivitas Program *Area Traffic Control System* (ATCS) Pada Dinas Perhubungan Kota Bandung (Studi Kasus Pada Simpang Cikapayang-Dago Kota Bandung)”

bertujuan untuk menganalisis keefektifitasan Program *Area Traffic Contol System* (ATCS). Penelitian ini menggunakan teori Administrasi Pemerintahan sebagai landasan, serta teori efektivitas menurut (Budiani 2007:53) dengan indikator ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, pemantauan program. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data, wawancara, observasi, dokumentasi. Data yang dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan uji keabsahan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program *Area Traffic Control System* (ATCS) pada Simpang Cikapayang-Dago Kota Bandung sudah dilaksanakan secara maksimal meskipun masih terdapat indikator yang belum dihasilkan secara optimal.

3. Peneliti M.Ahadi (2024)

Peneliti yang ketiga dilakukan oleh M.Ahadi (2024) yang berjudul efektivitas *Jambi City Operation Center* (JCOC) dalam dan melayani tertib lalu lintas di Kota Jambi. Penelitian ini bertujuan mengetahui kualitas pelayanan *Jambi City Operation Center* dan mengetahui efektivitas *Jambi City Operation Center* dalam mengurangi kemacetan lalu lintas. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas Duncan meliputi indikator pencapaian tujuan, integrasi, adaptasi. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik

pengumpulan data wawancara,observasi,dan dokumentasi.Analisis yang dilakukan melalui reduksi data,penyajian data,penarikan kesimpulan,denagn uji keabsahan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Jambi sadar bahwa JCOC Kota Jambi belum maksimal dikarenakan ada beberapa kendala yang dihadapi pada saat melakukan pemantauan arus lalu lintas, seperti listrik padam atau cuaca buruk membuat kamera pemantau tidak aktif, serta kendaraan melebihi kapasitas jalan sehingga menghambat kinerja JCOC Kota Jambi.

Tabel 2 1 Kajian Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan dan Perbedaan			
			Teori Yang Digunakan	Pendekatan	Metode	Teknik Analisis
1.	Peneliti Aidila Fitria (2023).	Efektivitas Program <i>Area Traffic Control System</i> (ATCS) Dalam Mengurangi Kemacetan Sebagai Penerapan Smart Traffic Di Kota Bandar Lampung	(Budiani 2007)	Kualitaif	Deskrptif	1.Wawancara 2.Obsevasi 3.Dokumentasi
2.	Peneliti Nurliana Kurniasih, Antik	Efektivitas Program <i>Area Traffic Control System</i> (ATCS) Pada Dinas Perhubungan	(Budiani 2007)	Kualitatif	Deskrptif	1.Wawancara 2.Obsevasi 3.Dokumentasi

	Bintari, Jajang Sutisna (2023).	Kota Bandung (Studi Kasus Pada Simpang Cikapayang- Dago Kota Bandung)				
3.	Peneliti M.Ahadi (2024)	Efektivitas Jambi <i>City</i> <i>Operation</i> <i>Center</i> (JCOC) dalam dan melayani tertib lalu lintas di Kota Jambi	Duncan (dalam Steers,201 2:53)	Kualitatif	Deskriptif	1.Wawancara 2.Obsevasi 3.Dokumentasi

Sumber: Penelitian 2026

Peneliti ini menemukan adanya perbedaan,persamaan,dan relevansi antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini.Berikut ini adalah persamaan dan pebedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu:

1. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti Aidila Fitria (2023) dengan penelitian ini adalah terletak pada lokus,dimana penelitian sebelumnya yaitu di Kota Bandar Lampung,sedangkan dalam penelitian ini lokusnya berada di Kota Bandung.Kemudian,persamaan penelitian sebelumnya dengan peneliti ini yaitu sama-sama mengenai efektivitas program (ATCS) ,serta jenis dan metode yang digunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.Adapun relevasi antara penelitian sebelumnya dengan peneliti ini adalah dapat memberikan pemahaman lebih lanjut kepada peneliti dalam mencapai keefektivitasan program (ATCS) sehingga program ini dapat berjalan dengan baik.

2. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti Nurliana Kurniasih, Antik Bintari, Jajang Sutisna (2023).dengan penelitian ini adalah terletak pada lokus,dimana penelitian sebelumnya yaitu di Kota Bandung dengan studi kasus di Simpang Cikapayang-Dago ,sedangkan dalam penelitian ini lokusnya berada di Kota Bandung studi kasus Persimpangan Pasteur.Kemudian,persamaan penelitian sebelumnya dengan peneliti ini yaitu sama-sama mengenai efektivitas program (ATCS) ,serta jenis dan metode yang digunakan sama,metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.Adapun relevansi antara penelitian sebelumnya dengan peneliti ini adalah dapat memberikan pemahaman lebih lanjut kepada peneliti dalam mencapai keefektifitasan program (ATCS) sehingga program ini dapat berjalan dengan baik.
3. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti Peneliti M.Ahadi (2024) dengan penelitian ini adalah terletak pada lokus dan teori,dimana penelitian sebelumnya yaitu Efektivitas Jambi *City Operation Center* (JCOC) Dalam Dan Melayani Tertib Lalu Lintas Di Kota Jambi,sedangkan dalam penelitian ini lokusnya Efektivitas Program *Area Traffic Control System* (ATCS) Dalam Menanggulangi Kemacetan Lalu Lintas Di Kota Bandung.Kemudian persamaan penelitian sebelumnya dengan peneliti ini yaitu sama-sama mengenai teori dari Duncan dalam Richard.M.Steers,sistem pengendalian lalu lintas berbasis teknologi informasi,serta,jenis dan metode yang digunakan sama,metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.Adapun relevansi antara penelitian sebelumnya dengan peneliti ini adalah dapat memberikan pemahaman lebih lanjut kepada peneliti dalam mencapai keefektifitasan sistem pengendalian lalu

lintas berbasis teknologi informasi sehingga program ini dapat berjalan dengan baik.

2.1.2. Kajian Terhadap *Grand Theory*

Grand Theory dalam penelitian adalah sebuah konsep utama yang digunakan oleh peneliti untuk mengalokasikan informasi perihal hipotesis yang dipergunakan. *Grand* teori bertujuan untuk mendukung penelitian yang didasarkan pada hasil *research gap* dan kerangka berpikir ilmiah tertentu. Apa itu *Grand theory*, *middle theory*, dan *applied theory* dapat diterapkan dalam bidang hukum, pendidikan, perawatan da ekonomi. *Research gap* adalah kumpulan hasil penelitian terdahulu yang disusun oleh peneliti untuk menentukan judul skripsi dan proposal penelitian yang dilakukannya.

Grand Theory dijadikan dasar dari hipotesis yang dipergunakan. Hipotesis adalah dugaan sementara variabel dependen dan variabel independen. Kerangka berpikir ilmiah adalah hubungan positif dan negatif tentang variabel dependen yang dipergunakan untuk menciptakan variabel independen dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, grand theory dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena pada tingkat yang lebih luas, seperti bagaimana norma budaya memengaruhi perilaku kelompok masyarakat tertentu (Ritchie et al. 108). Selain itu, grand theory memberikan landasan konseptual yang kuat dalam menjelaskan hubungan antarvariabel yang diteliti. Dengan adanya grand theory, peneliti dapat menyusun kerangka berpikir yang sistematis sehingga penelitian memiliki arah yang jelas.

2.1.2.1. Kajian Administrasi

Administrasi berasal dari bahasa Latin: *Ad*= intensif dan *Ministrare*= melayani, membantu. Administrasi merujuk pada kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan. Menurut (S.P. Siagian, 1973) Administrasi yaitu proses kerja sama antara dua orang atau lebih berdasarkan rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan. Pengertian ini menekankan bahwa administrasi merupakan proses yang sistematis dan terencana, di mana individu-individu dalam suatu organisasi saling berkoordinasi dan bekerja sama berdasarkan pertimbangan yang logis guna mencapai sasaran yang telah disepakati sebelumnya. Selanjutnya, (The Liang Gie, 1980) Administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu. Yang artinya administrasi tidak hanya berkaitan dengan kegiatan tulis-menulis atau pencatatan, tetapi mencakup seluruh upaya pengorganisasian, pembagian tugas, koordinasi, dan pengendalian pekerjaan agar tujuan bersama dapat tercapai secara teratur dan terarah.

Sementara Administrasi merupakan daya upaya manusia yang kooperatif dengan tingkat rasionalitas tinggi (Dwight Waldo, 1971), serta proses mencapai tujuan secara efisien melalui orang lain (Stephen P. Robins, 1983). Ciri pokok untuk disebut sebagai administrasi yaitu:

- 1) Sekelompok orang, artinya kegiatan administrasi hanya mungkin terjadi jika dilakukan oleh lebih satu orang.
- 2) Kerja sama, artinya kegiatan administrasi hanya mungkin terjadi jika dua orang atau lebih bekerja sama.
- 3) Pembagian tugas, kegiatan administrasi bukan sekedar kegiatan kerja sama, melainkan kerja sama tersebut didasarkan pada pembagian kerja yang jelas.
- 4) Kegiatan yang runtut dalam suatu proses, kegiatan administrasi berlangsung dalam tahapan-tahapan tertentu secara berkesinambungan.
- 5) Tujuan, sesuatu yang diinginkan untuk dicapai melalui kegiatan kerja sama.

Dari kelima unsur-unsur tersebut diatas dapat diartikan bahwa Administrasi Adalah segenap proses penyelenggaraan dalam setiap usaha Kerjasama sekelompok manusia untuk tujuan tertentu.

Dari definisi tersebut secara harfiah dapat diartikan sebagai berikut:

“Pengertian proses Adalah rangkaian pembuatan manusia yang mengandung maksud tertentu yang memang dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan itu. Disini termasuk pula segenap aktivitas yang terjadi sebagai akibat perbuatan ini”.

Pengertian prosedur Adalah suatu rangkaian metode yang telah menjadi pola tetap dalam melakukan sesuatu pekerjaan.

Pengertian Kerjasama (*Team Work*) Adalah keinginan untuk bekerja sama dengan orang lain secara kooperatif dan menjadi bagian dari kelompok. Bukan bekerja secara terpisah atau saling berkompetisi. Namun dibutuhkan kompetensi kerjasama menandakan peran sebagai anggota kelompok, bukan sebagai pemimpin.

2.1.2.2. Konsep Administrasi Publik

Administrasi publik adalah seluruh tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang meliputi: Administrasi sipil, Adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh departemen dan non departemen mulai dari kegiatan kelurahan sampai dengan kegiatan MPR (Manjelis Permusyawaratan Rakyat). Perubahan paradigma dari administrasi negara menjadi administrasi publik mencerminkan pergeseran dari sistem birokrasi yang kaku menuju tata kelola yang lebih partisipatif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Administrasi negara menekankan hierarki, aturan formal, dan kontrol pemerintah, sedangkan administrasi publik lebih menekankan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat. Perubahan ini dipicu oleh tuntutan reformasi birokrasi, kebutuhan pelayanan publik yang responsif, serta perkembangan konsep *good governance*. Paradigma baru menjadikan masyarakat sebagai mitra aktif dalam proses pemerintahan, bukan sekadar penerima kebijakan, sehingga menciptakan pemerintahan yang lebih demokratis dan inklusif.

Menurut Dimock (1993-19), mengatakan bahwa administrasi publik merupakan suatu bagian dari administrasi umum yang mempelajari bagaimana lembaga-lembaga, mulai dari suatu keluarga hingga Perserikatan Bangsa- Bangsa, disusun digerakan dan kemudian dikendalikan. Secara singkat, administrasi publik mempelajari proses pengaturan dan pengelolaan organisasi publik agar dapat berfungsi dan mencapai tujuannya secara terarah.

Presepsi tentang Administrasi Publik sangatlah bervariasi. Variasi ini dapat dilihat dari pendapat-pendapat yang dikutip oleh Stillman (1990) sebagai berikut:

- 1) Bartom & Chapple melihat administrasi public sebagai *“the work of government”* atau pekerjaan yang dilakukan pemerintah. Definisi ini menekankan aspek keterlibatan personel dalam memberikan pelayanan publik.
- 2) Nigro & Nigro mengemukakan bahwa administrasi publik Adalah usaha Kerjasama kelompok dalam suatu lingkungan publik, yang mencakup ketiga cabang yaitu yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Definisi ini lebih menekankan proses kelembagaan yang melibatkan usaha Kerjasama kelompok sebagai kegiatan public yang berbeda dari kegiatan swasta.

Mc Curdy (1986) dalam survey literturnya mengemukakan bahwa admininstras publik dapat diliat sebagai suatu proses politik, yaitu sebagai

satu satu metode memerintah suatu negara dan dapat juga dianggap sebagai cara yang prinsipil untuk melakukan berbagai fungsi negara. Dengan kata lain bahwa administrasi publik bukan hanya sekedar persoalan administratif tetapi juga persoalan politik. Safritz dan Russel (1997) mendefinisikan administrasi publik berdasarkan empat kategori sebagai berikut:

- 1) Definisi berdasarkan kategori politik.
- 2) Definisi berdasarkan kategori legal/hukum.
- 3) Definisi berdasarkan kategori Manajerial.
- 4) Definisi berdasarkan kategori mata pencaharian.

Dari semua batasan diatas, ada beberapa makna penting yang harus diingat karena berkenaan dengan hakekat administrasi publik. Pertama Bidang tersebut lebih berkaitan dengan dunia eksekutif, meskipun juga berkaitan dengan dunia legislatif dan yudikatif, kedua Bidang tersebut berkenaan dengan formulasi dan implementasi kebijakan public, ketiga bidang tersebut juga berkaitan dengan masalah manusia, keempat meskipun bidang tersebut hampir mirip dengan administrasi swasta, tapi *overlapping* dengan administrasi swasta, terakhir kelima bidang tersebut diarahkan untuk menghasilkan *public goods* dan *services*; dan bidang ini memiliki aspek teoritis dan praktis.

2.1.3. Kajian Terhadap *Middle Theory*

Middle theory adalah teori yang menjelaskan fenomena atau hubungan antar konsep dalam lingkup yang lebih terbatas dan spesifik, tetapi masih cukup

umum untuk diterapkan di berbagai konteks penelitian. Teori ini dikembangkan untuk menjembatani teori besar dengan realitas empiris. Dalam penelitian kualitatif, teori ini dapat digunakan untuk mengkaji bagaimana konflik antara pimpinan dan karyawan memengaruhi budaya kerja. *Middle-range theory* memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena yang lebih spesifik tetapi tetap menghubungkannya dengan konteks yang lebih luas (Bryman).

2.1.3.1. Teori *Digital Governance*

Digital governance, atau tata kelola digital, adalah penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan. Konsep ini melibatkan penggunaan platform digital untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan, serta memperkuat partisipasi publik. Dalam era digital, *digital governance* menjadi kunci untuk memastikan pemerintah dapat beroperasi secara efektif dan efisien. *Digital governance* mencakup berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi digital. Ini mencakup penggunaan teknologi untuk mempercepat proses birokrasi, meningkatkan layanan publik, mengoptimalkan pengambilan keputusan, dan meningkatkan interaksi antara pemerintah dan masyarakat.

Konsep *digital governance* memiliki beberapa prinsip dasar. Keterbukaan (*openness*) adalah salah satunya, yang menekankan pentingnya akses informasi publik dan partisipasi masyarakat dalam

pengambilan keputusan. Selain itu, keamanan (*security*) dan privasi (*privacy*) juga menjadi prinsip penting, dengan fokus pada perlindungan data yang dikelola pemerintah.

Dalam praktiknya, penerapan prinsip-prinsip *digital governance* memerlukan komitmen dan kerjasama dari berbagai pihak. Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang mendukung penggunaan teknologi dalam pelayanan publik dan pengambilan keputusan, sementara masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam proses ini. Peningkatan literasi digital juga menjadi kunci, dengan memberikan pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat tentang cara menggunakan teknologi untuk berinteraksi dengan pemerintah dan mengakses layanan publik dengan lebih efektif.

Peran ICT dalam *Digital governance*, penggunaan *Information and Communication of Technology* (ICT) telah menjadi bagian integral dalam upaya pemerintah untuk mencapai *digital governance* yang lebih baik. *Digital governance* menekankan penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. Kali ini, kita akan menguraikan peran penting yang dimainkan oleh ICT dalam mendukung *digital governance*, termasuk berbagai aspek yang terkait. Peran ICT diantaranya ialah sebagai berikut:

a. Efisiensi Layanan Publik

Salah satu peran utama TIK dalam mendukung *digital governance* adalah meningkatkan efisiensi layanan publik. Dengan menggunakan teknologi, pemerintah dapat merptomatiskan banyak proses administratif, mempercepat aliran informasi, dan meningkatkan aksesibilitas layanan bagi masyarakat. Misalnya, layanan pendaftaran penduduk secara daring dapat menghemat waktu dan biaya bagi masyarakat, sementara sistem manajemen keuangan yang terintegrasi dapat meningkatkan pengelolaan anggaran publik.

b. Tansparansi

TIK juga berperan dalam meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui platform daring dan portal transparansi, pemerintah dapat mempublikasikan informasi tentang kebijakan, anggaran, dan keputusan publik secara terbuka. Hal ini membantu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mengurangi risiko korupsi.

c. Akuntabilitas

Dalam konteks *digital governance*. TIK memainkan peran penting dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Dengan adanya sistem pelaporan elektronik dan mekanisme umpan balik dari masyarakat, pemerintah dapat secara lebih efektif memantau kinerja mereka dan bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka. Hal ini

membantu menciptakan lingkungan yang lebih akuntabel dan bertanggung jawab.

d. Responsivitas Pemerintah

Terakhir, TIK mendukung responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui media sosial, survei daring, dan aplikasi pelayanan publik, pemerintah dapat lebih mudah mendengar dan merespons masukan dan keluhan dari masyarakat. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk lebih cepat merespons perubahan kebutuhan dan tuntutan masyarakat, sehingga meningkatkan kepuasan dan kepercayaan mereka terhadap pemerintah.

Menurut Janssen et al. (2012): *Digital governance* mengatur mekanisme dan tanggung jawab kelembagaan untuk memastikan bahwa data dan sumber daya digital dikelola, digunakan, dan dibagikan secara tepat dan berkualitas. Kualitas data dalam konteks *digital governance* mencakup aspek validitas, akurasi, integritas, dan keterpaduan antar instansi. Tanpa data yang berkualitas, sistem digital hanya menjadi alat formalitas yang tidak mampu mendukung efektivitas pemerintahan.

2.1.4. Kajian Terhadap Operational Theory

Dalam suatu penelitian ilmiah, keberadaan teori tidak hanya berfungsi sebagai landasan konseptual, tetapi juga menjadi dasar untuk mengembangkan indikator yang dapat diukur secara empiris. Oleh karena itu, penting untuk

melakukan kajian terhadap operasionalisasi teori, agar konsep-konsep yang bersifat abstrak dapat diterjemahkan ke dalam bentuk variabel dan indikator yang relevan dan terukur.

Kajian terhadap operasional teori bertujuan untuk menjelaskan bagaimana suatu teori dijabarkan ke dalam dimensi, variabel, dan indikator yang digunakan dalam penelitian. Proses ini disebut sebagai operasionalisasi teori, yakni proses mentransformasi teori ke dalam ukuran-ukuran konkret yang bisa digunakan dalam pengumpulan dan analisis data. Dengan operasionalisasi yang tepat, peneliti dapat menghubungkan antara landasan teori dan kenyataan di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, *application theory* digunakan untuk menjelaskan temuan secara langsung dalam konteks lokal. Sebagai contoh, teori kepuasan kerja digunakan dalam wawancara dengan karyawan untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi motivasi mereka (Marshall and Rossman 80).

2.1.4.1. Efektivitas Program

Secara umum Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang (*view point*) dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi. Seperti yang dikemukakan oleh Arthur G. Gedeian dkk dalam bukunya *Organization Theory*

and Design yang mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: “*That is, the greater the extent to which an organization’s goals are met or surpassed, the greater its effectiveness*” (Semakin besar pencapaian tujuan organisasi semakin besar efektivitas) (Gedeian, 1991:61).

Suatu kegiatan yang dijalankan tentunya memiliki kesesuaian tujuan yang akan dicapai dapat diartikan sebagai efektivitas. Efektivitas merupakan alat ukur untuk menunjukkan tingkat keberhasilan terhadap tercapainya tujuan dalam pemanfaatan sumber daya serta sarana dan prasarana yang ditetapkan sebelumnya. Istilah efektivitas menurut Ensiklopedia Umum, berarti menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan. Suatu usaha dikatakan efektif apabila usaha itu mencapai tujuannya. Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, berarti pengaruh dari sesuatu, atau akibat tertentu dari sesuatu.

Berdasarkan pengertian di atas bahwa apabila pencapaian tujuan-tujuan daripada organisasi semakin besar, maka semakin besar pula efektivitasnya. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan adanya pencapaian tujuan yang besar daripada organisasi maka semakin besar pula hasil yang akan dicapai dari tujuan-tujuan tersebut.

Efektivitas menurut Subagyo dalam (Budiani, 2007) merupakan alat ukur untuk mengukur sejauh mana aktivitas tersebut dikatakan efektif antara kesesuaian output dengan tujuan yang ditetapkan. Sedangkan menurut Jibril (2017), efektivitas adalah suatu kriteria untuk menyeleksi berbagai alternatif untuk dijadikan rekomendasi didasarkan pertimbangan apakah alternatif yang

direkomendasikan tersebut memberikan hasil (akibat) yang maksimal, lepas dari pertimbangan efisiensi. Sedangkan Purnamawati et al. (2022) berpendapat efektivitas merupakan suatu indikator untuk mendefinisikan sejauh mana sasaran (kualitas, kuantitas, dan waktu) yang sudah dicapai oleh tatalaksana pada sasaran yang telah ditetapkan lebih dahulu. Efektivitas senantiasa terikat dengan jalinan antara efek dari rencana yang diinginkan dengan hasil yang sesungguhnya tergapai. Inilah yang dapat menjadi tolak ukur dalam pengukuran efektivitas.

Sama halnya dengan efektivitas program yang dapat pula dilihat sebagai tingkat pencapaian operatif dan operasional dalam menjalankan penerapan dari kebijakan, berlangsung dalam sistem yang berkelanjutan. Pada dasarnya efektivitas program merupakan seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dapat diartikan, apabila suatu pekerjaan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan, dapat dikatakan efektif tanpa memperhatikan waktu, tenaga dan yang lain (Sihombing, 2022).

Dengan demikian, efektivitas program digunakan untuk mengukur tingkat perolehan tujuan atau sasaran organisasional yang ditetapkan dengan mengacu pada rencana mengenai landasan, serta upaya memahami pengertian program. Efektivitas program ialah alat ukur untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam melaksanakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan sesuai pada rencana yang telah ditetapkan dengan mengacu kepada rencana mengenai landasan, serta upaya memahami pengertian program. Tingkat efektivitas bisa

dihitung dengan memadankan konsep yang telah ditegaskan dengan hasil yang sudah dibentuk.

Mengukur efektivitas program bukanlah perkara mudah karena efektivitas dapat diriset dari beragam perspektif dan terkait dengan siapa yang mengukur dan mendefinisikannya. Ukuran efektivitas merupakan bentuk tolak ukur atas tercapainya sasaran serta sasaran yang ingin dicapai. Selain itu, menampilkan fase seberapa jauh organisasi, program atau kegiatan menjalankan fungsi-fungsinya secara maksimal (Setiawan & Rahaju, 2021). Namun, apabila upaya atau hasil pekerjaan dan kegiatan yang dilaksanakan kurang tepat hingga menjadikan sasaran yang diinginkan belum tercapai, sehingga efektivitas disebut belum efektif (Ashari et al., 2022).

Efektivitas merupakan salah satu tipe evaluasi kebijakan. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dalam pelaksanaan kegiatan penilaian efektivitas dapat dilaksanakan dengan beragam tahapan berbeda, yaitu; (1) Evaluasi pada Tahap Perencanaan, (2) Evaluasi pada Tahap Pelaksanaan, dan (3) Evaluasi pada Tahap Pasca Pelaksanaan. Berdasarkan hal tersebut, evaluasi ini difungsikan dalam mengukur kemampuan (keluaran dan hasil dibandingkan masukan), efektivitas (hasil dan efek terhadap tujuan), atau manfaat (efek terhadap kepentingan) dari suatu program yaitu tipe evaluasi kebijakan yang terakhir.

Dalam mengukur suatu efektivitas dalam organisasi bukan hal yang mudah, karena efektivitas dapat dilihat dari sudut pandang yang berbeda-beda sesuai dengan penilaian masing-masing individu. Pengukuran efektivitas bisa dilihat dari kinerja yang telah dicapai pada suatu organisasi. Efektivitas dapat diukur melalui tercapainya atau tidak tujuan dari organisasi tersebut, jika organisasi tersebut bisa mencapai tujuannya tersebut dapat dikatakan bahwa organisasi tersebut berjalan dengan efektif. Hal yang paling penting adalah efektivitas tidak selalu diukur seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai suatu tujuan akan tetapi hanya dilihat dari proses suatu program guna mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Ketepatan Sasaran Program, yaitu selama objek yang dikenai dari program tersebut akurat dengan tujuan yang ditetapkan.

Menurut Duncan yang dikutip oleh Richards M. Steers dalam bukunya “Efektivitas Organisasi” yang menjelaskan mengenai ukuran efektivitas, antara lain:

1. Pencapaian Tujuan

Maksudnya adalah seluruh upaya atau usaha dalam pencapaian tujuan harus dianggap sebagai suatu proses atau cara sehingga diperlukan tahapan-tahapan dalam mencapai suatu tujuan. Dalam mencapai tujuan ada beberapa faktor, yaitu jangka waktu dan sasaran yang merupakan target nyata.

2. Integrasi

Yaitu pengukuran terhadap tingkat keahlian suatu organisasi untuk menyelenggarakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Intinya yaitu integrasi berkaitan dengan proses sosialisasi.

3. Adaptasi

Kemampuan suatu organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya sehingga perlu digunakan tolak ukur proses penerimaan atau pengisian tenaga kerja

Berdasarkan beberapa indeks efektivitas program di atas, maka peneliti mengambil indeks analisis efektivitas dari teori Duncan dalam Richards M. Steers (1985), yaitu 1) Pencapaian Tujuan; 2) Integrasi; dan 3) Adaptasi. Pemilihan teori tersebut diambil karena peneliti melihat banyak kesamaan dengan indikator menurut ahli lainnya serta lebih sesuai dan relevan dengan situasi di lapangan mengenai Efektivitas Program *Area Traffic Control System*, (ATCS) Pada Dinas Perhubungan Dalam Mengurangi Kemacetan Di Kota Bandung (Studi Kasus Di Persimpangan Pasteur).

2.1.5. Konsep Organisasi

Manusia pada hakikatnya tidak akan mampu hidup sendiri dan hampir sebagian besar bersangkutan atau berinteraksi dengan orang lain, maka ia perlu melibatkan diri dengan beberapa kelompok atau organisasi. Karena itu

organisasi terbentuk, Pengertian organisasi menurut Mathis dan Jackson dalam (Rernawan, 2011: 15)

“Organisasi merupakan suatu kesatuan sosial dari sekelompok manusia yang saling berinteraksi menurut suatu pola tertentu sehingga setiap anggota organisasi memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing, sebagai suatu kesatuan yang memiliki tujuan tertentu dan mempunyai batas-batas yang jelas, sehingga bisa dipisahkan”.

Berdasarkan pengertian diatas, bahwa organisasi adalah wadah sosial yang terdiri dari beberapa orang yang bekerja dan berinteraksi secara teratur mengikuti pola atau aturan tertentu. Setiap orang di dalam organisasi memiliki peran, fungsi, dan tugas yang berbeda-beda, namun semuanya terhubung sebagai satu kesatuan untuk mencapai tujuan bersama.

Sementara itu menurut Siagian dalam (Rahayu 2016:6) memberikan pemahaman lebih luas mengenai organisasi, yaitu:

“Setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan bersama dan terikat secara formal dalam suatu ikatan hierarki dimana selalu terdapat hubungan antara seorang atau sekelompok orang yang disebut pimpinan dan seorang atau sekelompok yang disebut bawahan”.

2.1.6. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen sumber daya manusia (*human resources management*) adalah rangkaian aktivitas organisasi yang diarahkan untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan tenaga kerja yang efektif. Manajer memiliki peran besar dalam mengarahkan orang-orang yang berada di organisasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan, termasuk memikirkan

bagaimana memiliki Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) yang mampu bekerja secara efektif dan efisien.

Manajemen sumber daya manusia (MSDM) menurut (Marwansyah, 2014:

3) berpendapat bahwa:

“Manajemen sumber daya manusia dapat diartikan sebagai pendayagunaan sumber daya manusia di dalam organisasi, yang dilakukan melalui fungsi-fungsi perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi, pengembangan sumber daya manusia, perencanaan dan pengembangan karir, pemberian kompensasi dan kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan kerja, dan hubungan industrial”.

Selain itu menurut (Kasmir, 2016: 25), menyatakan bahwa Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) adalah:

”Proses pengelolaan manusia, melalui perencanaan, rekrutmen, seleksi, pelatihan, pengembangan, pemberian kompensasi, karier, keselamatan dan kesehatan serta menjaga hubungan industrial sampai pemutusan hubungan kerja guna mencapai tujuan perusahaan dan peningkatan kesejahteraan stakeholder.”

Sedangkan menurut Sedarmayanti (2017:3-4), MSDM adalah suatu pendekatan dalam mengelola masalah manusia berdasarkan tiga prinsip dasar, yaitu:

1. Sumber daya manusia adalah harta/aset paling berharga dan penting yang dimiliki organisasi/perusahaan karena keberhasilan organisasi sangat ditentukan oleh unsur manusia.
2. Keberhasilan sangat mungkin dicapai, jika kebijakan prosedur dan peraturan yang berkaitan manusia dari perusahaan saling berhubungan dan menguntungkan semua pihak yang terlibat dalam perusahaan.

3. Budaya dan nilai organisasi perusahaan serta perilaku manajerial yang berasal dari budaya tersebut akan memberi pengaruh besar terhadap pencapaian hasil terbaik.

Manajemen sumber daya manusia akhir-akhir ini semakin mendapatkan perhatian dari berbagai pihak, baik berasal dari sektor publik maupun sektor swasta. Semua pihak telah menyadari betapa pentingnya manajemen sumber daya manusia dan tampak telah menjadi kebutuhan pokok bagi organisasi.

2.2. Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran merupakan teori yang digunakan oleh peneliti yang sesuai dengan topik penelitian yang disusun untuk memecahkan suatu permasalahan yang terjadi. Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang peneliti temui maka peneliti akan mengemukakan teori yang digunakan oleh peneliti dan selanjutnya akan menjadi kerangka pemikiran.

Menurut Richard M. Steers, efektivitas adalah tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas menunjukkan sejauh mana hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Organisasi yang efektif adalah organisasi yang mampu mencapai sasaran yang telah ditentukan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal.

Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas program *area traffic control system* dalam mengurangi kemacetan di Kota Bandung: Studi Kasus di Persimpangan Pasteur, perlu dilakukan analisis secara mendalam menggunakan indikator-indikator pengukuran dimensi efektivitas dalam bukunya *Efektivitas Organisasi*

(1985), Steers menjelaskan bahwa efektivitas organisasi dapat diukur melalui tiga indikator yang dikemukakan oleh Duncan, yaitu:

1. Pencapaian Tujuan

Menunjukkan sejauh mana organisasi atau program mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ATCS, indikator ini digunakan untuk melihat keberhasilan ATCS dalam mengurangi kemacetan dan meningkatkan kelancaran lalu lintas di Persimpangan Pasteur.

2. Integrasi

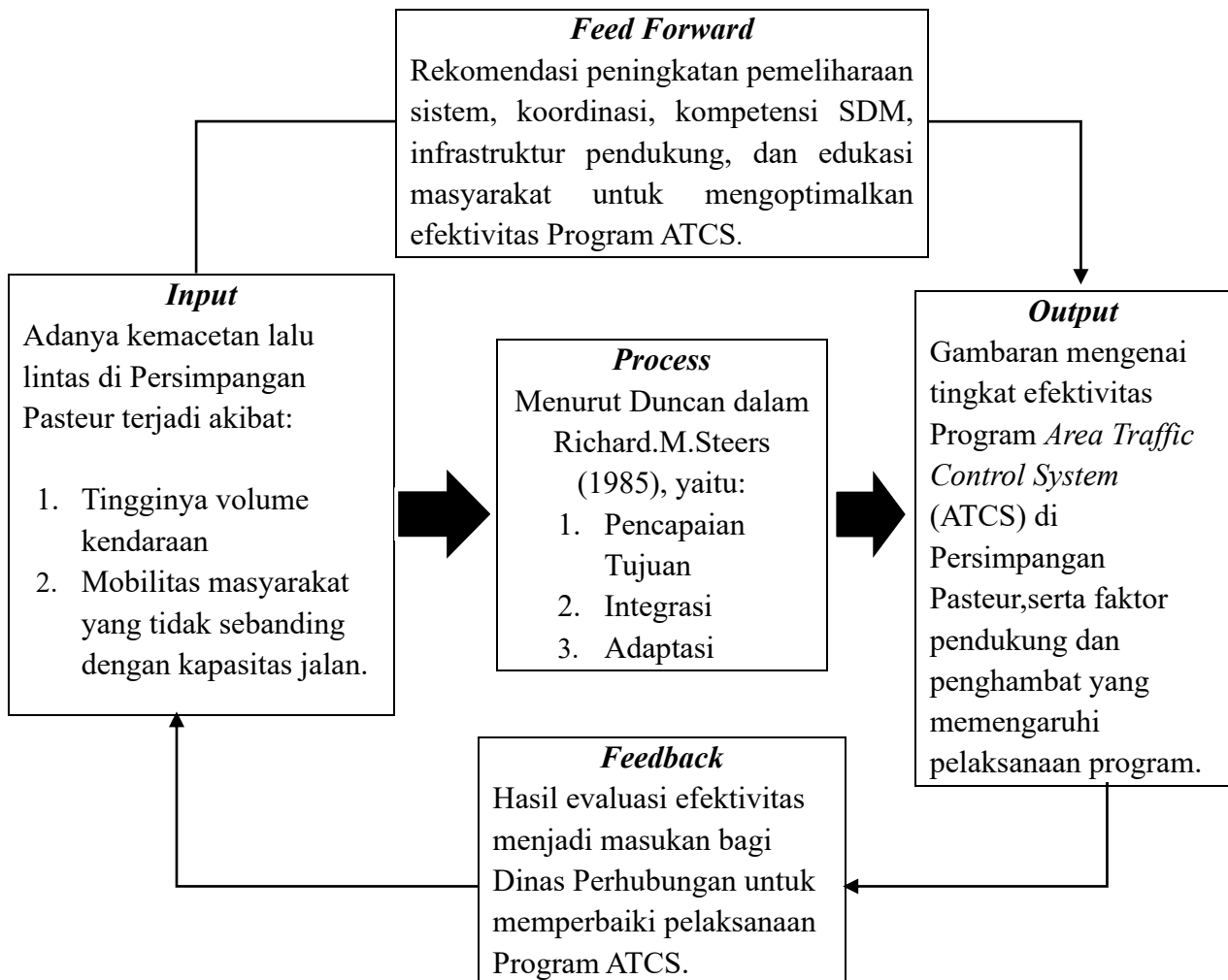
Menunjukkan kemampuan organisasi dalam melakukan koordinasi, komunikasi, dan sosialisasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan program. Pada penelitian ATCS, indikator ini dapat dilihat dari koordinasi antara Dinas Perhubungan, operator ATCS, dan instansi terkait dalam pengelolaan lalu lintas.

3. Adaptasi

Menunjukkan kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan dan kebutuhan yang berkembang. Dalam konteks ATCS, adaptasi dapat dilihat dari kemampuan sistem dan pengelola dalam menyesuaikan pengaturan lalu lintas terhadap kondisi kendaraan yang berubah-ubah.

Selanjutnya peneliti menyampaikan melalui gambar kerangka berpikir pada gambar berikut:

Tabel 2 2 Kerangka Berpikir



Sumber: Diolah Oleh Peneliti 2026

2.3. Proposisi

Proposisi adalah pernyataan atau kalimat yang menyatakan suatu pendapat, gagasan, atau hubungan antar konsep yang dapat dinilai benar atau salah. Dalam konteks penelitian, proposisi sering dipahami sebagai dugaan sementara mengenai hubungan antara dua atau lebih variabel. Proposisi ini menjadi dasar dalam menyusun hipotesis atau kerangka pemikiran penelitian.

Berdasarkan Identifikasi masalah serta kerangka pemikiran yang telah peneliti gambarkan diatas,dengan demikian peneliti mengajukan proporsisi sebagai berikut:

Berdasarkan teori efektivitas menurut Duncan dalam Richard M. Steers (1985), maka proposisi dalam penelitian ini adalah:

“Efektivitas Program *Area Traffic Control System* (ATCS) dalam mengurangi kemacetan lalu lintas di Persimpangan Pasteur Kota Bandung dapat dianalisis melalui dimensi pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi, serta dipahami melalui identifikasi faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan program”.

Untuk melakukan optimalisasi hasil laporan efektivitas pogram *area traffic control system* dalam mengurangi kemacetan di Kota Bandung:Studi Kasus Di Persimpangan Pasteur perlu adanya penerapan 3 (tiga) aspek penilaian yaitu:

1. Pencapaian Tujuan
2. Integrasi
3. Adaptasi

Ketiga dimensi tersebut digunakan sebagai alat analisis untuk mengidentifikasi keefektivitasan program *area traffic control system* serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program tersebut.